

Analisis Prinsip Biaya Historis (The Cost Principle) sebagai Dasar Pengukuran Aset dalam Akuntansi

Muhammad Riyan Dani¹, Yolanda Pratiwi², Vina Julianti³, Roy Prayuda⁴, Egidius Egia Aginta Ginting⁵, Rivana Perangin-Angin⁶, Jufri Darma⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

E-mail : ¹riyandani816@gmail.com , ²yolandapratiwi584@gmail.com , ³vinajulianti779@gmail.com ,
⁴royprayuda16@gmail.com , ⁵egidiusginting@gmail.com , ⁶rivanaperangin.angin5@gmail.com ,
⁷jufriharma@unimed.ac.id

Email Penulis Korespondensi: ¹riyandani816@gmail.com

Abstrak- Prinsip biaya historis merupakan salah satu konsep dasar dalam akuntansi yang digunakan untuk menentukan nilai aset berdasarkan harga perolehan awalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip biaya historis sebagai dasar pengukuran aset dalam laporan keuangan, serta meninjau relevansi dan reliabilitasnya dalam konteks perkembangan standar akuntansi keuangan modern seperti IFRS dan PSAK 16. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik, jurnal ilmiah, dan standar akuntansi internasional yang membahas perbandingan antara biaya historis dan nilai wajar. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun biaya historis memiliki keunggulan dari sisi objektivitas, verifikasi, dan konsistensi, namun kelemahannya terletak pada kurangnya relevansi informasi ketika terjadi perubahan nilai ekonomi secara signifikan. Di sisi lain, pendekatan nilai wajar lebih mencerminkan kondisi ekonomi terkini tetapi memiliki potensi subjektivitas yang tinggi. Oleh karena itu, dalam praktik akuntansi modern, penggunaan biaya historis masih tetap dipertahankan terutama untuk aset tetap, dengan penyesuaian pengungkapan nilai wajar pada laporan tambahan sesuai dengan ketentuan IFRS. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara reliabilitas dan relevansi informasi keuangan dalam menentukan metode pengukuran aset, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman prinsip dasar akuntansi yang mendasari penyajian laporan keuangan yang andal dan transparan.

Kata Kunci: Biaya Historis, Pengukuran Aset, Prinsip Akuntansi, IFRS, PSAK 16, Nilai Wajar

Abstract - The historical cost principle is one of the fundamental concepts in accounting used to determine asset values based on their original acquisition cost. This study aims to analyze the application of the historical cost principle as the basis for asset measurement in financial statements and to examine its relevance and reliability within the context of modern accounting standards such as IFRS and PSAK 16. The research method applied is a literature review by examining various academic sources, scientific journals, and international accounting standards discussing the comparison between historical cost and fair value. The results indicate that although historical cost provides advantages in terms of objectivity, verifiability, and consistency, it lacks relevance when significant economic value changes occur. On the other hand, the fair value approach better reflects current economic conditions but introduces a higher degree of subjectivity. Therefore, in modern accounting practice, the use of historical cost remains dominant, particularly for fixed assets, complemented by fair value disclosures as required by IFRS. This study highlights the importance of balancing the reliability and relevance of financial information in determining asset measurement methods and contributes to a deeper understanding of the fundamental accounting principles underlying reliable and transparent financial reporting.

Keywords: Historical Cost, Asset Measurement, Accounting Principles, IFRS, PSAK 16, Fair Value

1. PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan sistem informasi yang memiliki peran penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dalam menghasilkan informasi yang berkualitas, akuntansi berlandaskan pada seperangkat prinsip dan asumsi yang diatur secara sistematis dan berterima umum. Salah satu prinsip mendasar yang membentuk kerangka pelaporan keuangan adalah prinsip biaya historis (the cost principle). Prinsip ini menetapkan bahwa aset harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan biaya perolehannya, bukan berdasarkan nilai pasar atau nilai yang disesuaikan. Dengan kata lain, nilai yang tercatat dalam pembukuan merupakan jumlah uang atau sumber daya ekonomi yang benar-benar dikeluarkan pada saat aset tersebut diperoleh. Konsep ini menjadi salah satu fondasi utama dalam praktik akuntansi modern karena menjamin adanya objektivitas, keandalan, dan konsistensi dalam penyajian laporan keuangan. Secara historis, penerapan prinsip biaya dalam akuntansi muncul dari kebutuhan akan informasi yang dapat diverifikasi dan tidak bersifat subjektif. Ketika perusahaan melakukan transaksi pembelian aset, biaya yang dikeluarkan menjadi bukti konkret yang dapat ditelusuri melalui dokumen seperti faktur, kuitansi, atau bukti pembayaran lainnya. Nilai biaya tersebut menjadi ukuran yang objektif dan tidak

mudah dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi, inflasi, atau fluktuasi pasar (AASB, 2014). Oleh karena itu, the cost principle memberikan dasar yang kuat bagi akuntan dalam mencatat aset secara konsisten dari waktu ke waktu. Dengan pencatatan berbasis biaya historis, laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan karena angka yang tercantum di dalamnya bersumber dari transaksi nyata, bukan dari estimasi atau penilaian subjektif (Stekom). Namun, seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan perubahan lingkungan ekonomi global, prinsip biaya historis mulai mendapatkan tantangan konseptual. Kondisi ekonomi yang dinamis, perubahan harga pasar, dan inovasi dalam instrumen keuangan menyebabkan nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan sering kali tidak lagi mencerminkan nilai sebenarnya di pasar saat ini. Misalnya, aset tetap seperti tanah atau bangunan yang diperoleh puluhan tahun lalu dengan harga yang relatif rendah, kini mungkin memiliki nilai pasar yang jauh lebih tinggi. Ketidakesesuaian antara nilai buku dan nilai wajar inilah yang menjadi salah satu kritik utama terhadap penerapan prinsip biaya historis. Dalam konteks inilah muncul pendekatan baru seperti fair value accounting, yang menekankan pada penilaian aset berdasarkan nilai pasar terkini. Meskipun demikian, prinsip biaya historis masih dianggap relevan karena menawarkan stabilitas dan keandalan yang tidak selalu dapat dijamin oleh metode penilaian berbasis nilai wajar.

Dari sudut pandang teori akuntansi, the cost principle memiliki hubungan erat dengan konsep konservatisme dan prinsip objektivitas. Prinsip konservatisme mengajarkan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian, akuntan sebaiknya mencatat nilai yang tidak melebihi-lebihkan aset atau laba perusahaan (IFRS, 2015). Dengan mendasarkan pengukuran pada biaya perolehan, laporan keuangan menjadi lebih hati-hati dalam menilai kekayaan perusahaan. Sementara itu, prinsip objektivitas menuntut agar informasi akuntansi didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi. Kedua prinsip ini secara bersama-sama mendukung keberlanjutan penggunaan prinsip biaya historis dalam praktik akuntansi. Oleh karena itu, meskipun terdapat perkembangan standar akuntansi internasional seperti IFRS yang memperkenalkan konsep nilai wajar, banyak perusahaan tetap menggunakan prinsip biaya historis untuk sebagian besar asetnya, terutama yang bersifat jangka panjang dan sulit dinilai kembali secara objektif. Penerapan prinsip biaya historis juga memberikan dampak signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, khususnya pada komponen neraca dan laporan laba rugi (ACCA, 2020). Dalam neraca, aset yang dicatat berdasarkan biaya historis memberikan gambaran mengenai investasi awal perusahaan dalam memperoleh sumber daya ekonomi. Sementara dalam laporan laba rugi, biaya historis menjadi dasar dalam menghitung penyusutan dan beban, yang selanjutnya memengaruhi penentuan laba bersih. Dengan demikian, akurasi dalam penerapan prinsip ini sangat memengaruhi kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada pengguna laporan, termasuk investor, kreditur, dan manajemen internal. Kesalahan dalam pencatatan atau penyimpangan dari prinsip biaya dapat menimbulkan distorsi informasi yang berpotensi menyesatkan pengambilan keputusan ekonomi (Massimo et al., 2013).

Penting untuk disadari bahwa penerapan prinsip biaya historis bukan tanpa keterbatasan. Dalam situasi ekonomi yang bergejolak, nilai riil aset mungkin jauh berbeda dari nilai perolehannya, sehingga laporan keuangan kehilangan relevansinya sebagai alat untuk mencerminkan posisi keuangan aktual perusahaan (IAI, 2023). Oleh karena itu, para akuntan dan pembuat standar akuntansi terus berupaya mencari keseimbangan antara reliabilitas dan relevansi informasi keuangan. Analisis terhadap prinsip biaya historis perlu dilakukan untuk memahami sejauh mana prinsip ini masih sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan modern, serta bagaimana penerapannya dapat disesuaikan dengan dinamika ekonomi dan perkembangan standar akuntansi internasional (Investopedia, 2010).

Meskipun berbagai penelitian dan literatur akuntansi telah membahas perdebatan antara penggunaan prinsip biaya historis dan pendekatan nilai wajar dalam pengukuran aset, sebagian besar kajian terdahulu cenderung menitikberatkan pada perbandingan teknis atau implikasi kuantitatif kedua metode tersebut secara terpisah. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya belum mengkaji secara mendalam posisi prinsip biaya historis sebagai fondasi konseptual yang tetap dipertahankan dalam kerangka standar akuntansi modern, khususnya dalam konteks keseimbangan antara relevansi dan reliabilitas informasi keuangan. Selain itu, masih terbatas kajian yang mengintegrasikan perspektif teoritis, standar akuntansi (IFRS dan PSAK 16), serta implikasi praktis penerapan biaya historis dalam pelaporan keuangan kontemporer. Oleh karena itu, artikel ini memberikan kontribusi dengan menyajikan analisis konseptual yang komprehensif mengenai peran prinsip biaya historis sebagai dasar pengukuran aset di tengah berkembangnya penggunaan nilai wajar. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip biaya historis tidak sekadar merupakan metode pencatatan tradisional, melainkan tetap memiliki relevansi strategis dalam menjaga objektivitas, auditabilitas, dan akuntabilitas laporan keuangan, serta menawarkan kerangka pemahaman yang lebih seimbang bagi akademisi dan praktisi akuntansi dalam menilai dinamika pengukuran aset pada era akuntansi modern.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau studi kepustakaan sebagai pendekatan utama dalam menganalisis prinsip biaya historis (the cost principle) sebagai dasar pengukuran aset dalam akuntansi.

Metode studi literatur merupakan suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku-buku teks akuntansi, jurnal ilmiah, standar akuntansi keuangan, hasil penelitian terdahulu, serta literatur akademik lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep dan penerapan prinsip biaya historis dalam praktik akuntansi. Penggunaan metode ini dianggap tepat karena tujuan utama penelitian adalah untuk melakukan analisis konseptual dan teoretis terhadap prinsip biaya historis, bukan untuk menguji hipotesis secara empiris. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat menelusuri perkembangan pemikiran mengenai the cost principle dari masa ke masa, membandingkan pandangan para ahli akuntansi, serta mengidentifikasi implikasi prinsip tersebut dalam pelaporan keuangan modern. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan sintesis atas teori-teori yang ada dan menarik kesimpulan logis mengenai relevansi prinsip biaya historis di tengah perubahan paradigma akuntansi global menuju penilaian berbasis nilai wajar (fair value).

Langkah-langkah dalam pelaksanaan studi literatur ini meliputi beberapa tahapan sistematis. Pertama, tahap identifikasi sumber literatur, di mana peneliti menentukan kriteria pemilihan sumber yang kredibel, seperti publikasi ilmiah bereputasi, standar akuntansi seperti PSAK dan IFRS, serta referensi akademik terbaru terkait pengukuran aset. Kedua, tahap pengumpulan data pustaka, yang dilakukan dengan menelusuri jurnal elektronik, buku teks, dan artikel ilmiah dari berbagai basis data akademik. Ketiga, tahap analisis isi (content analysis), yaitu membaca secara kritis isi literatur untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan perkembangan konsep the cost principle serta pengaruhnya terhadap pelaporan keuangan. Keempat, tahap sintesis dan interpretasi, di mana peneliti mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber untuk membentuk pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai topik yang diteliti. Selama proses penelitian, peneliti juga memperhatikan validitas dan relevansi data pustaka yang digunakan. Setiap sumber akan dievaluasi berdasarkan kredibilitas penulis, tahun publikasi, serta kesesuaiannya dengan konteks standar akuntansi yang berlaku di Indonesia maupun internasional. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif, sehingga mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam aspek pengukuran aset.

Metode studi literatur ini menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip biaya historis diterapkan, keunggulan dan kelemahannya dibandingkan metode lain, serta sejauh mana prinsip ini masih relevan dalam menghadapi tantangan pelaporan keuangan modern. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan dasar teoritis yang kuat dan memperkaya wacana akademik mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal dan konsisten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini berfokus pada penguraian mendalam terhadap konsep, penerapan, serta relevansi prinsip biaya historis (the cost principle) dalam akuntansi modern. Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan dari berbagai sumber akademik, buku teks akuntansi, serta standar akuntansi internasional dan nasional, ditemukan bahwa prinsip biaya historis tetap menjadi salah satu dasar utama dalam sistem pelaporan keuangan, meskipun telah banyak muncul alternatif pengukuran berbasis nilai wajar (fair value) (Costa et al., 2013). Analisis dalam bagian ini tidak hanya menyoroti aspek teoritis dari prinsip tersebut, tetapi juga mengeksplorasi keunggulan, keterbatasan, serta relevansinya dalam praktik pelaporan keuangan di era globalisasi ekonomi. Selain itu, pembahasan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana prinsip biaya historis membentuk landasan pengukuran aset, mengapa prinsip ini masih digunakan secara luas, serta bagaimana implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan (Redalyc, 2011). Adapun hasil analisis dibagi ke dalam beberapa poin utama sebagai berikut.

Pemahaman Konseptual tentang Prinsip Biaya Historis (The Cost Principle)

Prinsip biaya historis merupakan salah satu pilar fundamental dalam akuntansi keuangan yang berfungsi sebagai dasar pencatatan aset pada saat perolehan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aset yang dimiliki perusahaan harus dicatat berdasarkan biaya perolehan aktualnya, yaitu nilai uang yang benar-benar dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut hingga siap digunakan. Biaya tersebut dapat mencakup harga beli, pajak pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta pengeluaran lain yang diperlukan agar aset berfungsi sebagaimana mestinya. Konsep ini menekankan dua prinsip utama, yaitu objektivitas dan verifikasiabilitas (Deloitte, 2018). Objektivitas memastikan bahwa pencatatan aset tidak didasarkan pada perkiraan atau opini pribadi, sementara verifikasiabilitas menuntut adanya bukti transaksi yang nyata seperti faktur, nota pembelian, atau kontrak. Oleh karena itu, prinsip biaya historis menjamin bahwa setiap nilai yang tercatat dalam laporan keuangan memiliki dasar bukti yang dapat diverifikasi. Dari sudut pandang etika akuntansi, prinsip ini mencerminkan sikap konservatisme, di mana akuntan diharuskan berhati-hati dalam menilai aset agar tidak menimbulkan kesan berlebihan terhadap posisi keuangan perusahaan. Dengan mencatat aset berdasarkan biaya historis, laporan

keuangan menjadi lebih dapat dipercaya karena tidak bergantung pada fluktuasi nilai pasar yang bersifat spekulatif.

Dasar Teoritis dan Landasan Standar Akuntansi

Secara teoritis, prinsip biaya historis berakar pada kerangka konseptual akuntansi yang menempatkan keandalan dan keterverifikasian sebagai karakteristik kualitatif utama dari informasi keuangan. Dalam kerangka Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), biaya historis digunakan sebagai metode utama untuk mengukur aset tetap, persediaan, dan aset lainnya karena dianggap paling stabil dan obyektif. Dalam konteks Indonesia, landasan penerapan prinsip biaya historis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 tentang Aset Tetap (Rahmawati, 2006). PSAK ini menegaskan bahwa pengakuan awal aset harus dilakukan berdasarkan biaya perolehan, yaitu seluruh pengeluaran yang secara langsung dapat diatribusikan hingga aset siap digunakan. PSAK juga memberikan opsi bagi entitas untuk menggunakan model revaluasi setelah pengakuan awal, namun tetap menjadikan biaya historis sebagai dasar pencatatan pertama. International Financial Reporting Standards (IFRS) juga mengakui biaya historis sebagai metode pengukuran yang paling dapat diuji, meskipun menyediakan alternatif nilai wajar bagi entitas yang ingin mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Namun, IFRS tetap menegaskan bahwa dalam kondisi normal, biaya historis lebih unggul dalam hal reliabilitas, objektivitas, dan auditabilitas. Oleh karena itu, prinsip biaya historis tetap menjadi fondasi utama akuntansi, meskipun praktik nilai wajar semakin banyak diterapkan di beberapa sektor industri.

Kelebihan Prinsip Biaya Historis dalam Pelaporan Keuangan

Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip biaya historis memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya tetap relevan di tengah perubahan paradigma akuntansi modern.

Menjamin Objektivitas dan Verifiabilitas, Setiap nilai yang dicatat dapat ditelusuri melalui dokumen transaksi yang sah, sehingga laporan keuangan terbebas dari unsur subjektivitas dan manipulasi.

Menyediakan Konsistensi Antarperiode, Karena menggunakan dasar pencatatan yang sama dari waktu ke waktu, perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang mudah dibandingkan antarperiode. Hal ini membantu analisis tren dan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Menawarkan Stabilitas Nilai, Fluktuasi harga pasar tidak memengaruhi nilai yang tercatat, sehingga laporan keuangan tetap stabil dan tidak menimbulkan kesan volatilitas yang berlebihan.

Memudahkan Audit dan Penilaian, Biaya historis mudah diverifikasi melalui bukti pembayaran atau faktur, sehingga proses audit dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, prinsip biaya historis telah menjadi dasar yang kuat untuk menjaga transparansi, keandalan, dan kredibilitas laporan keuangan. Prinsip ini juga memberikan perlindungan bagi pengguna laporan agar tidak tertipu oleh angka-angka yang bersifat spekulatif.

Relevansi The Cost Principle di Era Akuntansi Modern

Pada akuntansi kontemporer, prinsip biaya historis tetap relevan karena memberikan dasar etis dan metodologis dalam penyusunan laporan keuangan (IFRS, 2018). Relevansi ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut.

Keandalan (Reliability), Biaya historis menghasilkan angka yang pasti dan terukur, sehingga lebih dapat dipercaya dibandingkan penilaian berbasis estimasi pasar. Hal ini penting bagi perusahaan yang mengutamakan stabilitas dan keakuratan pelaporan.

Auditabilitas, Prinsip ini mendukung proses audit eksternal yang efisien karena setiap nilai memiliki bukti transaksi konkret. Dengan demikian, laporan keuangan lebih mudah diverifikasi oleh auditor independen.

Akuntabilitas Manajemen, Biaya historis mencerminkan pertanggungjawaban manajemen terhadap penggunaan sumber daya perusahaan. Nilai yang dilaporkan adalah hasil transaksi nyata, bukan asumsi, sehingga mencerminkan tanggung jawab keuangan yang sesungguhnya.

Keseimbangan antara Relevansi dan Reliabilitas, Dalam praktiknya, banyak perusahaan menggunakan biaya historis sebagai dasar pencatatan dan nilai wajar sebagai pengungkapan tambahan (disclosure). Pendekatan ini memungkinkan laporan keuangan tetap akurat sekaligus relevan dengan kondisi ekonomi aktual.

Prinsip biaya historis masih memiliki posisi penting dalam sistem akuntansi global. Meskipun muncul berbagai alternatif pengukuran, prinsip ini tetap menjadi fondasi utama yang menjamin transparansi, keandalan, dan konsistensi pelaporan keuangan, serta berperan penting dalam menjaga integritas profesi akuntan di tengah perkembangan zaman.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip biaya historis (the cost principle) memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia akuntansi, baik secara teoritis maupun praktis. Sejak awal dikembangkan, prinsip ini telah menjadi dasar utama dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan karena memberikan jaminan objektivitas, keandalan, dan konsistensi atas setiap nilai yang disajikan. Melalui pendekatan biaya perolehan, laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi perusahaan secara faktual berdasarkan bukti transaksi yang sah dan dapat diverifikasi. Hal ini sejalan dengan tujuan utama akuntansi, yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna, jujur, dan dapat dipercaya untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kerangka standar akuntansi seperti GAAP, IFRS, dan PSAK, prinsip biaya historis tetap dijadikan dasar pengakuan awal aset. Prinsip ini memberikan kestabilan dan keseragaman dalam pelaporan antarperiode, serta menjamin keakuratan informasi yang digunakan oleh berbagai pihak seperti investor, kreditor, dan auditor. Selain itu, biaya historis juga berperan penting dalam menjaga akuntabilitas manajemen, karena setiap nilai yang tercatat memiliki dasar transaksi yang nyata, bukan hasil estimasi subyektif. Namun, perkembangan lingkungan bisnis global dan dinamika ekonomi modern memunculkan kritik terhadap prinsip ini. Dalam kondisi inflasi tinggi dan perubahan nilai pasar yang cepat, nilai historis sering kali dianggap tidak lagi mencerminkan realitas ekonomi terkini. Oleh karena itu, muncul pendekatan fair value accounting yang menekankan relevansi nilai pasar saat ini. Meskipun demikian, prinsip biaya historis masih dianggap lebih unggul dalam hal reliabilitas dan auditabilitas, terutama bagi aset berumur panjang yang tidak memiliki pasar aktif.

Prinsip biaya historis tetap menjadi pondasi akuntansi yang tidak tergantikan. Relevansinya di era modern justru semakin penting dalam menjaga keseimbangan antara keandalan dan relevansi informasi keuangan. Integrasi antara biaya historis dan nilai wajar menjadi solusi ideal untuk menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya faktual, tetapi juga kontekstual terhadap kondisi ekonomi yang dinamis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap prinsip biaya historis tidak hanya penting bagi akademisi dan praktisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dalam membangun sistem pelaporan keuangan yang transparan, kredibel, dan berkelanjutan.

REFERENCES

- AASB (Australian Accounting Standards Board). (2014). *Conceptual framework for financial reporting*. Australian Accounting Standards Board.
- ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). (2020). *The conceptual framework for financial reporting: Overview*. ACCA.
- Costa, M., & Guzzo, G. (2013). *Fair value accounting versus historical cost accounting: Theoretical issues and empirical evidence*. Virtus Interpress.
- Deloitte. (2018). *IAS 16—Property, plant and equipment*. IAS Plus—Deloitte.
- Firdaus, A. (2025). *Akutansi biaya (Edisi 6)*. Salemba Empat.
- IFRS Foundation. (2015). *IAS 16: Property, plant and equipment*. IFRS Foundation.
- IFRS Foundation. (2018). *Conceptual framework for financial reporting*. IFRS Foundation.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *PSAK 16: Aset tetap*. IAI.
- Investopedia. (2010). *Accounting theory in financial reporting*. Investopedia.
- Massimo, C., & Giusy, G. (2013). *Fair value versus historical cost: A comparative review*. Virtus Interpress.
- Meilani, F. A. (2025). *Prinsip dasar akuntansi: Konsep, tantangan, dan implikasinya dalam penyusunan laporan keuangan*. *Journal of Social Science Research*, 2234–2255.
- Rahmawati, E. (2006). *Support and against historical cost accounting: Is it value relevance for decision making?* *Jurnal Akuntansi dan Investasi*.
- Redalyc. (2011). *Fair value versus historical cost: Empirical evidence*. Redalyc Journal Database.
- ResearchGate. (2022). *Historic cost accounting versus fair value accounting: A comparative effect on profitability*. ResearchGate.
- Simanjuntak, D. (2023). *Historical cost vs current cost accounting method*. *Brazilian Journals*.
- Stekom. (2021). *Accounting principles: Historical cost principle*. Digi-Lib STEKOM.
- Wahjono. (2025). *Penggunaan prinsip akuntansi dalam penerapan pembukuan transaksi keuangan UMKM untuk pembuatan pelaporan keuangan*. *Jurnal Infokam*, 7–12.